



DPD Tolak Tunda Pilkada

■ KPU: Ubah Dulu UU Kalau Mau Tunda

JAKARTA, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai, penundaan pemilihan kepala daerah secara serentak, mengada-ada. Pilkada serentak mesti berjalan pada Desember 2015 lantaran tidak ada alasan yang kuat untuk menggugurkan amanat Undang-undang perihal Pilkada serentak.

"(Penundaan) itu mengada-ada. Agenda kebangsaan harus jadi prioritas, tidak boleh dikalahkan apa pun," kata Irman di Jakarta, Minggu (21/6).



“(Penundaan) itu mengada-ada. Agenda kebangsaan harus jadi prioritas, tidak boleh dikalahkan apa pun.”

IRMAN GUSMAN

Ketua Dewan Perwakilan Daerah

Wacana penundaan Pilkada serentak mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 334 miliar di KPU. Temuan itu berasal dari audit BPK terhadap anggaran KPU tahun 2013-2014.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut, besarnya indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan BPK pada anggaran pemilu di KPU tahun 2013 dan 2014 berdampak besar ter-

■ Bersambung ke Hal. 7



DPD Tolak Tunda Pilkada Serentak

Sambungan Hal. 1

hadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Menurut Taufik, dengan adanya laporan BPK ini, integritas KPU sebagai penyelenggara pilkada dipertanyakan.

"Tergantung audit. Bisa KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 ditunda," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Kamis (18/6).

Apa lagi, kata Taufik, ada peringatan dari BPK terkait rencana pelaksanaan pilkada serentak itu, seperti belum adanya anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian RI. DPR pun berencana mengadakan rapat dengan KPU untuk membahas temuan tersebut dalam waktu dekat. "Senin akan ada rapat dengan Komisi II, Selasa rapat Komisi III dengan KPU dan kepolisian. Rabu baru rapat gabungan," ujar Taufik.

Bagi Irman, KPU justru harus menindaklanjuti temuan BPK tersebut, dan bukannya menunda pilkada atau mengganti komisioner KPU. "Ini jangan-jangan ada upaya melemahkan KPU," ujar Irman.

Irman enggan menduga-duga apakah upaya penundaan pilkada serentak ini ada hubungannya dengan partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan. "Intinya, tidak boleh lembaga apa pun cederai agenda nasional," tuturnya seraya berharap pilkada serentak diikuti banyak calon independen. Caranya, dengan menyesuaikan syarat calon independen. Sebab, saat ini aturan mengenai syarat calon kepala daerah dari jalur independen masih terbilang tinggi. Hal ini dianggap menyulitkan bagi calon perorangan untuk tampil bersaing dengan calon-calon yang dijagokan partai politik.

"Kami dukung calon independen, tapi syaratnya perlu kita pertanyakan," kata Irman.

Menurutnya, satu syarat yang menyulitkan itu adalah besarnya jumlah dukungan masyarakat untuk calon independen. Di Sumatera Bar-

at, misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 5,5 juta, calon independen itu harus mendapatkan dukungan lebih dari 600.000 warga.

Irman menambahkan, syarat untuk calon independen seharusnya mengacu pada jumlah pemilih, bukan jumlah penduduk. Dalam hal ini, partai politik harus lebih terbuka dan jangan menutup peluang calon independen untuk berkontribusi.

"Syaratnya ini seakan enggak *friendly* sama calon independen. Syarat calon independen ini harus didorong, bukan untuk dimudahkan, tapi agar ideal," ujarnya.

Dalam syarat calon independen untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa, minimal harus memiliki 10 persen dukungan dalam bentuk fotokopi KTP dan formulir yang ditandatangani pendukungnya. Untuk jumlah penduduk 2-6 juta jiwa, syarat dukungannya minimal harus 8,5 persen. Untuk daerah dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa, calon independen harus mendapatkan dukungan minimal 7,5 persen.

Rencananya, pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah.

Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik mengatakan pelaksanaan pilkada serentak bakal berjalan sesuai jadwal. "Tidak ada alasan bagi kami untuk menunda pilkada," ujar Husni Kamil.

Husni mengatakan wacana penundaan pilkada serentak sekedar dinamika politik di Tanah Air. Apalagi, saat ini terdapat 156 orang yang mendaftarkan di KPU untuk calon perorangan.

"Sampai saat ini sudah 156 orang yang daftar sampai nanti kita akan tutup pendaftaran tanggal 28 Juli untuk calon dari partai politik," tambahnya.

Dari 156 orang tersebut, Husni mengatakan sudah dalam tahap verifikasi persyaratan dan beberapa sudah dinyatakan tidak lolos dari persyaratan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menilai, terlalu berlebihan apabila pemilihan kepala daerah serentak harus ditunda karena hasil audit BPK. Audit BPK terhadap anggaran pemilu KPU tahun 2013 dan 2014, yang terindikasi merugikan negara Rp 334 miliar, tak akan mempengaruhi tahapan pilkada serentak yang sudah berjalan. "Kalau mau ditunda itu, harus mengubah undang-undang," kata Sigit.

Ia menjelaskan, KPU saat ini sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. "Sepanjang persiapannya dilihat tidak sempurna untuk dilaksanakan, bisa kita tunda. Tapi ini sudah siap semuanya," ujar Sigit.

Penggantian komisioner, kata Sigit, juga baru bisa dilakukan setelah jabatan habis. Komisioner baru bisa diberhentikan dan diganti apabila melakukan pelanggaran tata tertib dan dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kalau tidak harus menunggu 5 tahun jabatan habis dulu, sesuai mandat UU," ucap Sigit.

Sigit pun menegaskan, saat ini KPU sudah menindaklanjuti hasil audit BPK. Setidaknya, 70 persen temuan tersebut sudah berhasil ditindaklanjuti. "Karena kita tidak ingin KPU tidak terbebani dengan temuan itu. Apa yang jadi rekomendasi BPK bisa dituntaskan. KPU terus bekerja keras," ucapnya. (tribun-news/ryo/kps)